

# OPTIMALISASI APLIKASI PPID DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN

Rofingatun Nur Laila Salmah

NPP 29.0848

*Asdaf Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah  
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan*

Email: salmarofingatun@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** *The Kebumen PPID application is one of the website-based application innovations launched by the Kebumen Regency Government in 2019. The Information Management and Documentation Officer (PPID) is the official responsible for storing, documenting, providing, and/or providing information in public agencies. There are several problems that occur in optimizing the PPID application, including manual information services in public bodies that are not effective and efficient, people are reluctant to fill out Information Application information forms, delay in PPID Assistant OPD in uploading data, incomplete data on the Kebumen PPID Website, news presented on the website is old news, and in 2020 Kebumen Regency will be included in the “Towards Informative” category.* **Purpose:** *The purpose of this study was to identify and describe the optimization of the PPID application in improving public information services at the Communication and Information Office of Kebumen Regency and to analyze the factors that influence the optimization of the PPID application in improving public information services at the Communication and Information Office of Kebumen Regency.* **Method:** *In this study, researchers used the optimization theory of Hotniar Siringoringo (2005). The method used in this research is qualitative-descriptive research with an inductive approach. Data collection techniques using observation, interview and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion drawing.* **Result:** *Improvements still need to be made, in which the improvement is due to the inhibiting factors. Inhibiting factors include the lack of public awareness of e-government, socialization has not gone well, and the role of PPID Assistant is less active. The efforts made by the Communication and Information Office of Kebumen Regency are to disseminate public services through social media, accelerate the process of redevelopment the PPID website and conduct technical guidance to PPID Assistant OPD staff.* **Conclusion:** *Based on the result of the research that the optimization of the Kebumen PPID application in improving public information services has been running well but not optimally.*

**Keyword:** *Optimization, Information, Public Service, PPID Application*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Aplikasi PPID Kebumen merupakan salah satu inovasi aplikasi berbasis website yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun 2019. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam optimalisasi aplikasi PPID antara lain pelayanan informasi di badan publik secara manual tidaklah efektif dan efisien, masyarakat enggan mengisi formulir informasi Pemohon Informasi, keterlambatan PPID Pembantu OPD dalam mengunggah data, ketidaklengkapan data pada website PPID Kebumen, berita yang disajikan pada website merupakan berita lama, dan pada tahun 2020 Kabupaten Kebumen masuk ke dalam kategori “Menuju Informatif”. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang optimalisasi aplikasi PPID dalam meningkatkan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen serta untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi aplikasi PPID dalam meningkatkan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen. **Metode:** Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori optimalisasi dari Hotniar Siringoringo (2005). Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Masih perlu dilakukan perbaikan, yang mana perbaikan tersebut dikarenakan adanya faktor penghambat. Faktor penghambat diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat akan *e-government*, sosialisasi belum berjalan dengan baik, dan peran PPID Pembantu yang kurang aktif. Adapun upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen yaitu melakukan sosialisasi pelayanan publik melalui media sosial, mempercepat proses *redevelopment* website PPID dan melakukan bimtek kepada staf PPID Pembantu OPD. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian bahwa optimalisasi aplikasi PPID Kebumen dalam meningkatkan pelayanan informasi publik sudah berjalan baik namun belum maksimal. **Kata kunci:** Optimalisasi, Informasi, Pelayanan Publik, Aplikasi PPID

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Aplikasi PPID Kebumen merupakan salah satu inovasi aplikasi berbasis website yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun 2019. Aplikasi PPID Kebumen dikembangkan untuk menjadi penyelenggara layanan informasi dan komunikasi publik yang unggul, transparan dan akuntabel sebagai bentuk penerapan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik secara manual membutuhkan waktu yang cukup panjang karena berbagai macam alasan. Adanya aplikasi PPID membuat masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Untuk mengajukan permohonan data, para pemohon diharuskan mengisi formulir informasi pemohon informasi publik yang didalamnya akan diminta data pribadi pemohon.

PPID Utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya dibantu oleh PPID Pembantu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah. Namun sayangnya peran PPID Pembantu OPD Kabupaten Kebumen masih belum semuanya aktif dalam mengunggah informasi/dokumen terbaru di website [ppid.kebumen.go.id](http://ppid.kebumen.go.id). Selain terjadinya kekosongan data, juga terjadi ketidaklengkapan data dalam website PPID Kebumen. Pada bagian “Profil”, struktur organisasi hanya terdapat gambar bagan struktur organisasi PPID Utama Kabupaten Kebumen namun tidak terdapat keterangan nama pejabat dan foto pejabat terkait. Kemudian pada bagian “Hubungi Kami” juga narahubung yang dicantumkan tidak lengkap. Dan pada bagian “Berita”, berita-berita yang ditampilkan belum diperbaharui. Postingan berita terakhir pada tahun 2019.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 pada Badan Publik di Lingkup Jawa Tengah, nilai kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam rangka pemeringkatan keterbukaan badan publik, Kabupaten Kebumen menduduki peringkat X dengan predikat “Menuju Informatif”. PPID Kabupaten Kebumen harus terus berupaya melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Bukan semata untuk menaikkan peringkat, akan tetapi keterbukaan informasi publik memang seharusnya menjadi prinsip yang mendasar bagi setiap badan publik.

Website PPID memiliki tampilan yang sederhana sehingga dipandang kurang menarik. Padahal tampilan merupakan hal pertama yang dilihat oleh masyarakat sebelum menggunakan website. Hal ini semakin diperjelas ketika tampilan website PPID Kabupaten Kebumen disandingkan dengan Website PPID Kabupaten/Kota disekitarnya (dalam kasus ini yaitu PPID Magelang). Desain website yang menarik akan dapat meningkatkan kepercayaan pengguna atau masyarakat dan tentu menarik masyarakat untuk mengunjungi hingga menggunakan website.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Terdapat permasalahan-permasalahan berhubungan dengan pelayanan informasi publik di Kabupaten Kebumen melalui aplikasi PPID. Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi dibadan publik secara manual kurang efektif dan efisien. Kemudian, untuk mengajukan permohonan data, para pemohon diharuskan mengisi formulir informasi pemohon informasi publik yang didalamnya akan diminta data pribadi pemohon yang mana membuat masyarakat ragu hingga enggan mengajukan permohonan. Selain itu, website PPID Kabupaten Kebumen beberapa kali mengalami kekosongan data karena OPD sebagai PPID Pembantu masih lambat dalam mengunggah data yang mana menghambat penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Ketidaklengkapan data dalam website PPID Kebumen menjadi permasalahan selanjutnya, seperti tidak adanya keterangan pada gambar bagan struktur organisasi PPID Utama Kabupaten Kebumen. Bukan hanya tidak lengkap, berita yang ditampilkan pun berita-berita lawas.

Pada tahun 2020 Kabupaten Kebumen mendapatkan kategori “Menuju Informatif” pada acara Keterbukaan Informasi (KIP) Awards. Maka sudah sepatutnya PPID terus berbenah untuk memperbaiki layanan informasinya. PPID Kebumen juga harus berbenah perihal tampilan website. Karena tampilan website PPID dipandang kurang menarik bila dibandingkan dengan website PPID kabupaten/kota disekitarnya. Apabila dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik masih kurang optimal terutama dalam pengadaan informasi, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan berusaha untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dari sumber yang tidak jelas

informasinya. Padahal PPID berperan sebagai garda terdepan dalam upaya menyediakan informasi pelayanan publik yang akurat dan sesuai kebutuhan masyarakatnya.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Tri Asih Wismaningtyas dan Yuni Kurniasih yang berjudul Analisis Ketercapaian Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Semarang (Studi Kasus: Organisasi Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Semarang), menemukan bahwa keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sudah berjalan baik dilihat dari kelengkapan dan kebaruan informasi yang tercantum dalam situs web-situs web resmi pemerintah kota Semarang (Tri Asih Wismaningtyas dan Yuni Kurniasih, 2021). Penelitian Misnawati Heru Setiawan menemukan bahwa pelayanan informasi Publik PPID di Diskominfo Kab. Tanjung Jabung Barat belum efektif karena memiliki beberapa kendala, yaitu terbatasnya SDM yang ahli di bidang IT, kurangnya sosialisasi dari Dinas terkait, dan kendala penyediaan infrastruktur dan ketersediaan anggaran (Setiawan, 2021). Penelitian Aditya Marcello Sumartono dan Stefanus Sampe, Neni Kumayas selanjutnya berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi pelayanan publik menemukan bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat kota Manado lewat aplikasi (SiTasya) belum optimal hal ini banyak keluhan dari masyarakat kota Manado yang menggunakan aplikasi tersebut yang sering mengeluhkan beberapa kendala ketika pengguna ingin mengakses layanan informasi lewat aplikasi (SiTasya), (Sumartono et al., 2020). Selanjutnya penelitian oleh Edwin Nurdiansyah menemukan hasil Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui UU tersebut pemerintah diwajibkan untuk memberikan informasi secara rutin kepada warganya sehingga mereka dapat mengetahui hal apa saja yang telah dilakukan pemerintah dan melalui keterbukaan informasi akan terwujud transparansi kepada masyarakat (Nurdiansyah, 2016). Berdasarkan hasil penelitian Ndoheba Kenda tentang implementasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pada pemerintah Provinsi Gorontalo, penulis menemukan bahwapada tahun 2012 Provinsi Gorontalo menerima penghargaan Nasional Implementasi e-Government Indonesia berdasarkan pemeringkatan PeGi namun implementasi PPID di Gorontalo belum optimal dan belum dikenal masyarakat karena implementasi tergantung pada penggerak publik tidak fokus akandukungan lembaga, sumber daya manusia dan infrastruktur (Kenda, 2015).

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yaitu pelayanan informasi publik melalui aplikasi PPID Kebumen yang mana dapat membuat pelayanan informasi publik menjadi lebih efisien, efektif dan fleksibel. Kemudian untuk lokus penelitian yang berada di Kabupaten Kebumen , Provinsi Jawa Tengah juga berbeda dengan peneitian-penelitian terdahulu. Selain itu, indikator/dimensi yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat Hotniar Siringoringo (2005) yang menyatakan bahwa optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimumkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya. Terdapat 3 (tiga) elemen optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi.

## 1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi aplikasi PPID dalam meningkatkan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen. Serta untuk mengetahui faktor penghambat optimalisasi aplikasi PPID dalam meningkatkan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dan upaya pemerintah untuk mengatasi faktor penghambat tersebut.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara terhadap 7 orang informan yang terdiri atas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kebumen, Kepala Bidang Pengelolaan Data Elektronik Diskominfo Kebumen, Kasi Diseminasi Informasi dan Analisis Media Diskominfo Kebumen, Petugas *Front Office* Diskominfo Kebumen, dan 2 orang masyarakat Kebumen. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini ialah teori optimalisasi oleh Hotniar Siringoringo (2005) yang menyatakan bahwa optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya. Terdapat 3 (tiga) elemen optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi (Siringoringo, 2005).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1.1 Optimalisasi Aplikasi PPID Kebumen dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik

Optimalisasi ialah penerimaan hasil sesuai keinginan yang efektif dan efisien. Penulis menerapkan teori Optimalisasi menurut Hotniar Siringoringo untuk menganalisis bagaimana optimalisasi aplikasi PPID dalam meningkatkan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen. Menurut Hotniar Siringoringo (2005:4) optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya. Optimalisasi dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi.

#### 1) Tujuan

Konsep tujuan ialah mencakup proses maksimalisasi maupun minimalisasi. Maksimalisasi berlaku saat orientasi tujuan mencakup keuntungan, penerimaan, dan semacamnya. Sementara minimalisasi digunakan saat tujuan dari optimalisasi berkaitan dengan biaya, waktu, jarak dan semacamnya. Tujuan dari adanya aplikasi PPID dalam

pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen untuk memberikan pelayanan informasi publik sudah berjalan dengan baik. Kualitas pelayanan informasi publik berdasarkan pencapaian yang diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen telah meningkat yaitu dalam acara Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award pada tahun 2020 Kabupaten Kebumen mendapatkan predikat “Menuju Informatif” sedangkan pada tahun 2021 sudah mendapatkan predikat “Informatif”. Dalam hal meminimalisasi dapat disimpulkan bahwa pelayanan informasi publik berbasis teknologi, yaitu menggunakan aplikasi PPID akan menghemat waktu, biaya dan tenaga.

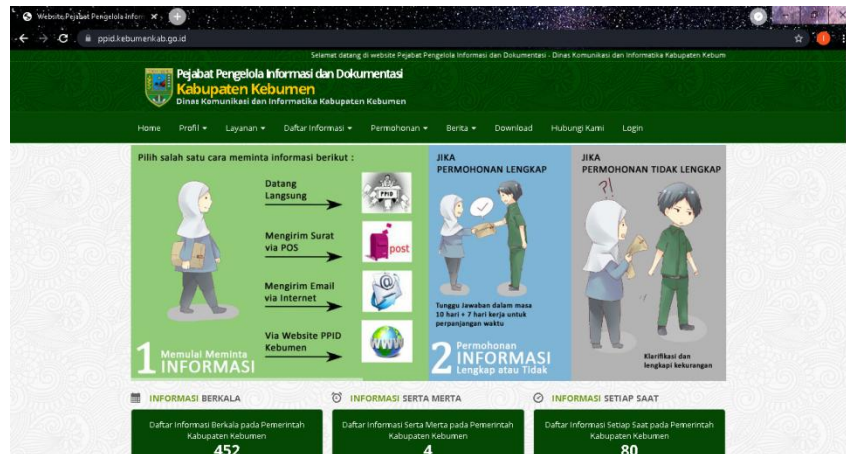
Tabel 3.1 Daftar Susunan Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Kategori Informatif dan menuju informatif tahun 2021

NO	BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
1.	Kota Surakarta	96.00	Informatif
2.	Kab. Demak	95.71	Informatif
3.	Kab. Kebumen	95.09	Informatif
4.	Kab. Wonogiri	94.46	Informatif
5.	Kab. Karanganyar	94.15	Informatif
6.	Kab. Batang	93.42	Informatif
7.	Kab. Banyumas	93.21	Informatif
8.	Kota Semarang	91.56	Informatif
9.	Kab. Temanggung	89.56	Menuju Informatif
10.	Kab. Klaten	88.96	Menuju Informatif
11.	Kab. Kudus	88.44	Menuju Informatif
12.	Kab. Wonosobo	84.40	Menuju Informatif
13.	Kab. Purbalingga	83.96	Menuju Informatif
14.	Kab. Kendal	82.96	Menuju Informatif
15.	Kab. Cilacap	80.85	Menuju Informatif

Sumber: kipjateng.jatengprov.go.id, diakses pada 18 Januari 2022

Selanjutnya tujuan minimalisasi dari adanya optimalisasi aplikasi PPID dalam meningkatkan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen didapatkan apabila terjadi penurunan materi maupun non materi yang tidak menimbulkan kerugian. Prosedur permohonan informasi publik sudah tersedia secara lengkap dan jelas pada website PPID Kebumen. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Dan para pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen juga mendapatkan keringanan dalam bekerja karena tidak harus melayani masyarakat yang jumlahnya banyak.

Gambar 3.1 Alur Permohonan Informasi



Sumber: ppid.kebumenkab.go.id, diakses pada 18 Januari 2022

## 2) Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan menjadi suatu bentuk pemilihan alternatif terbaik dari banyaknya alternatif yang ada untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen memberikan perhatian dalam pengambilan alternatif keputusan dalam rangka mengoptimalkan pelayanan di era digital dengan harapan keputusan yang diambil dapat berjalan secara efektif dan efisien. Setiap program yang dibuat sudah selayaknya untuk dibuat seefektif mungkin dengan tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat Kabupaten Kebumen. Aplikasi PPID Kebumen merupakan alternatif yang efektif karena aplikasi PPID Kebumen telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kebumen. Dimana masyarakat Kebumen yang sudah menguasai teknologi, dilihat dari tingginya angka pengguna smartphone yang didukung dengan sinyal internet yang bagus.

Gambar 3.2 Peta Sinyal Jaringan Telekomunikasi Kabupaten Kebumen



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, 2022

Namun sayangnya hal ini tidak diimbangi dengan sosialisasi yang baik pada masyarakat. Karena masih banyak masyarakat Kabupaten Kebumen yang belum mengetahui keberadaan maupun fungsi dari aplikasi ini dan hal ini pun didukung dengan pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, Bapak Drs. Budhi Suwanto, M. Si., pada hari Senin 24 Januari 2022 bahwa sosialisasi aplikasi PPID Kebumen pada masyarakat hanya dilakukan saat pertama kali aplikasi dikeluarkan pada tahun 2019.

### 3) Sumberdaya yang Dibatasi

Sumber daya merupakan suatu nilai yang terdapat pada suatu materi maupun suatu elemen tertentu dalam kehidupan. Ketersediaan sumber daya ini terbatas. Sarana prasarana (barang inventaris) yang ada di ruangan khusus pelayanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen sudah memadai dan layak untuk digunakan. Kemudian untuk menjamin kelancaran internet untuk pelayanan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen memiliki akses internet tersendiri. Selanjutnya sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen memiliki jumlah yang terbatas. Meski demikian, sedikitnya jumlah pegawai tidak memengaruhi pelayanan informasi publik maupun berjalannya aplikasi PPID Kebumen.

## **3.2 Hambatan yang Memengaruhi Optimalisasi Aplikasi PPID dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen**

Penulis menemukan beberapa hambatan sehingga menyebabkan aplikasi PPID di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen tidak berjalan optimal sebagaimana mestinya. Faktor penghambat optimalisasi aplikasi PPID Kebumen di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen antara lain:

### 1) Kurangnya sosialisasi aplikasi PPID Kebumen pada masyarakat

Sosialisasi sangat penting diberikan kepada masyarakat. Setelah wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, diketahui bahwa sosialisasi aplikasi PPID kepada masyarakat secara umum hanya pernah dilakukan sekali yaitu pada saat peluncuran. Hal ini berdampak pada minimnya pengetahuan masyarakat akan adanya aplikasi PPID Kebumen.

### 2) Pencantuman data pribadi pemohon informasi

Setiap mengajukan permohonan informasi masyarakat harus mengisi formulir informasi pemohon. Informasi pemohon berisikan data-data pribadi seperti foto KTP, hal ini menyebabkan sebagian masyarakat yang menginginkan informasi publik menjadi enggan mengajukan permohonan informasi publik. Pada Tahun 2021 ini, PPID Utama Kabupaten Kebumen mengabulkan 30 (tiga puluh) pemohon informasi dari 32 (tiga puluh dua) permintaan informasi publik yang telah diterima. Sedangkan 2 permintaan informasi publik ditolak karena persyaratan yang tidak lengkap.



3) Peran PPID Pembantu masih kurang

Peran serta PPID Pembantu merupakan faktor penting yang mendukung keberhasilan aplikasi PPID Kebumen dalam mengoptimalkan pelayanan informasi publik. Namun, pada kenyataannya peran PPID Pembantu OPD yang masih belum semuanya aktif dalam mengunggah informasi/dokumen terbaru di website [ppid.kebumenkab.go.id](http://ppid.kebumenkab.go.id).

### **3.3 Upaya Mengatasi Hambatan yang Dihadapi dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen melakukan upaya-upaya sebagai bentuk antisipasi terhadap Faktor-faktor penghambat yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan.

- 1) Sosialisasi kepada masyarakat via media sosial  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen melakukan upaya untuk mengatasi hambatan terkait kurangnya sosialisasi dalam pelayanan informasi publik melalui aplikasi PPID yaitu melakukan sosialisasi menggunakan media sosial. Melalui media sosial ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan berbagai program milik pemerintah yang kini kebanyakan berbasis teknologi informasi. Meskipun masyarakat tidak memanfaatkan semua aplikasi milik pemerintah setidaknya mereka memiliki pengetahuan akan aplikasi yang diluncurkan oleh pemerintah.
- 2) Melakukan perbaikan dan pembaruan pada website PPID Kebumen  
Pada saat ini website PPID Kebumen tengah mengalami perbaikan dan pengembangan atau redevelopment. Hal yang diperhatikan ialah untuk informasi berkala akan langsung disajikan pada website tanpa perlu mengirim permohonan yang mana menyertakan identitas pribadi masyarakat. Selanjutnya fitur “Berita” akan dihilangkan karena dianggap tidak terlalu penting untuk disajikan pada website PPID dan juga karena sudah ada di website lainnya, baik milik pemda ([kebumenkab.go.id](http://kebumenkab.go.id)) maupun milik diskominfo ([kominfo.kebumenkab.go.id](http://kominfo.kebumenkab.go.id)).
- 3) Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf PPID pembantu OPD pada kegiatan sosialisasi, bimtek, rapat dan uji konsekuensi yang diselenggarakan PPID Utama Sumber daya manusia PPID Pembantu OPD perlu untuk ditingkatkan. Terhambatnya pendistribusian dokumen informasi public seringkali disebabkan oleh OPD yang lambat dalam mengunggah dokumen.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Adanya aplikasi PPID membuat masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit-belit karena dilayani lewat satu pintu. Aplikasi PPID merupakan salah satu bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Transparansi merupakan salah satu aspek yang penting dalam mewujudkan *good governance*. Pemerintah diharuskan memiliki sikap terbuka dalam menyelenggarakan pemerintahan. Penulis menemukan temuan penting yakni Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pemegang jabatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama memiliki peran penting dalam menyediakan informasi publik. Sama halnya dengan temuan Misnawati dan Heru Setiawan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki hubungan erat akan ketersediaan informasi publik selain itu hal ini juga merupakan

implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Misnawati Heru Setiawan, 2021). Begitupun dengan temuan Tri Asih Wismaningtyas dan Yuni Kurniasih bahwa keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang telah berjalan baik terbukti dengan didapatnya predikat pemerintah daerah “Informatif” di Jawa Tengah yang mana sebagai bukti ketercapaian implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tri Asih Wismaningtyas dan Yuni Kurniasih, 2021).

Layaknya aplikasi pemerintah lainnya, aplikasi PPID Kebumen juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya kesiapan OPD sebagai PPID Pembantu yang masih belum aktif. Sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur juga menjadi masalah berikutnya, layaknya temuan Ndoheba Kenda (Ndoheba Kenda, 2015). Transparansi selain sebagai salah satu jalan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, setiap warga Negara juga memang memiliki hak asasi manusia untuk mendapatkan informasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 menjamin hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi, seerti yang disebutkan dalam penelitian Edwin Nurdiansyah (Edwin Nurdiansyah, 2016).

Aplikasi SiTasya merupakan salah satu contoh aplikasi milik pemerintah selain aplikasi PPID . aplikasi SiTasya merupakan layanan aplikasi yang bertugas memantau keadaan sekitar Kota Manado melalui CCTV yang dipasang pada 20 titik sehingga masyarakat dapat melihat keadaan sekitar Kota Manado dengan mengakses aplikasi SiTasya. Penelitian oleh Aditya Marcello Sumartono, Stefanus Sampe, dan Neni Kumayas sejalan dengan maksud penelitian ini yaitu mengenai keterbukaan informasi (Aditya Marcello Sumartono dan Stefanus Sampe, 2020).

### 3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan factor penghambat optimalisasi aplikasi PPID Kebumen yakni kesiapan OPD sebagai PPID Pembantu yang memiliki peran penting justru belum mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu website PPID Kebumen hingga saat peneliti melakukan penelitian masih mengalami *redevelop* atau perbaikan dan pengembangan website. Kemudian minimnya pengetahuan masyarakat Kabupaten Kebumen akan aplikasi milik pemerintah, khususnya PPID menandakan kurangnya sosialisasi ataupun pengenalan kepada masyarakat. Padahal pada eradigital ini sosialisasi sangat mudah dilakukan diberbagai platform, yang paling sederhana ialah sosialisasi menggunakan media sosial.

## IV. KESIMPULAN

Proses optimalisasi sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal, karena pada ketiga dimensi dari optimalisasi masih terdapat kekurangan. Meskipun tujuan dari optimalisasi sudah dapat dikatakan telah tercapai, namun sosialisasi sebagai alternatif keputusan masih belum bernilai efektif bagi masyarakat Kebumen. Dan untuk sumber daya yang dibatasi, khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen sudah menunjukkan keberhasilan dari adanya optimalisasi.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian. Dimana penelitian ini hanya memiliki waktu 14 hari dengan 10 hari kerja. Saat melakukan wawancara pada masyarakat sebagai informan juga mengalami kendala karena

kebanyakan masyarakat yang menjadi pemohon informasi merupakan orang yang berasal dari luar Kabupaten Kebumen

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Dengan kemajuan teknologi dan adanya tuntutan dari pemerintah agar setiap pemerintah daerah mampu menjalankan pemerintahan secara digital (*e-government*). Oleh karena itu, penulis menyarankan agar PPID Utama yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen lebih aktif lagi menjalankan perannya sebagai penyedia informasi dan mengeluarkan aplikasi PPID berbasis *mobile* agar lebih mudah diakses masyarakat.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terutama kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Dan terkhusus untuk orang tua penulis yang selalu mendukung dan mendoakan kelancaran penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Domai, Tjahjanulin, dkk. 2015. Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik. Malang: UB Press.
- Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- O'brien, J. A. Dan Marakas, G. M. 2014. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.
- Siringoringo, H. (2005). *Pemrograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*. Pustaka Pelajar.
- Subatri, Tata. 2005. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kenda, N. (2015). Implementasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 19(3), 123810.
- Nurdiansyah, E. (2016). Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 3(2), 147–151. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/view/4593/pdf>
- Setiawan, M. H. (2021). *www.ejournal.an-nadwah.ac.id Page | 50. 11*(Juni), 50–68.
- Siringoringo, H. (2005). *Pemrograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*. Pustaka Pelajar.
- Sumartono, A. M., Sampe, S., & Kumayas, N. (2020). *Issn : 2337 - 5736*. 2(5), 1–12.
- Tri Asih Wismaningtyas dan Yuni Kurniasih. (2021). *J p a l g*. 5(1), 33–42. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v5i1.3850>

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

<https://kominfo.kebumenkab.go.id/> diakses pada 1 September 2021

<https://ppid.kebumenkab.go.id/> diakses pada 3 September 2021

Achmad, Fandi. 2021. *Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (Kip Award) Tahun 2020* <https://kipjateng.jatengprov.go.id/penganugerahan-keterbukaan-informasi-publik-kip-award-tahun-2020/> diakses pada 29 oktober 2021

Nugraha, Bagia. 2020. *Memperoleh Informasi Publik Adalah Hak Konstitusional Warga Negara*. <https://suarakebebasan.id/memperoleh-informasi-publik-adalah-hak-konstitusional-warga-negara/> diakses pada 31 Agustus 2021.

